

**PENYIMPANGAN PRINSIP KERJA SAMA DAN PRINSIP SOPAN SANTUN  
DALAM RAPAT DINAS TERBUKA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA**

Nurul Ufiana C.A.

*“The Divergences of the Cooperative and Manners Principle in the Open Meetings of Surabaya City Regional Representatives Council” is the title of this study which is aimed to describe (1) the types of the cooperative principle divergences in Surabaya City open official meetings, and (2) the types of the manner principle divergences in Surabaya City open official meetings. The sources of this research are taken from the utterances of Surabaya City Council and its invited guests. The research is focused on the problem of cooperative principle and manner principle in the open meetings of Surabaya City Council department which is studied through its pragmatic aspects. The data were obtained by using the method of seeing, recording, writing, and speaking. Descriptive qualitative data processing was used to analyze the data. The results of the research showed some of the following: (1) Type of the divergence of the cooperative principle that consists of a single divergence. The single divergences includes the divergences of maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance, and maxim of implementation (2) Type of the divergence of the manner principle that consists of a single divergence. The single divergence includes the divergences of maxim of wisdom, maxim of generosity, maxim of praise, maxim of modesty, maxim of agreement, and maxim of sympathy.*

*Keywords: pragmatic, Grice’s cooperative principle, Leech’s politeness principle, Surabaya City Council.*

### **Pendahuluan**

Kehidupan bermasyarakat sangat berhubungan erat dengan komunikasi bahasa. Menurut Kridalaksana (2005:3) menjelaskan bahwa “Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri.” Sehingga dari pendapat Kridalaksana dapat diartikan bahwa bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sangat erat hubungannya dengan ujaran.

Berawal dari Ilmu linguistik yang di dalamnya juga terdapat ilmu pragmatik. Ilmu linguistik menjelaskan bahwa ilmu tersebut merupakan tentang bahasa; atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya; atau lebih tepat lagi seperti apa yang dikatakan Martinet dalam Abdul Chaer (2012:1) “Telaah ilmiah mengenai bahasa manusia.” Sedangkan ilmu pragmatik menurut Taringan (2009:30) menjelaskan bahwa “Pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memusatkan perhatian pada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial.”

DPRD Kota Surabaya merupakan suatu objek penelitian yang diambil oleh peneliti. Dalam hal ini DPRD merupakan sebuah lembaga resmi pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden dan mengawasi tindakan presiden.

Rapat merupakan suatu pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu, sidang, majelis (KBBI, 2012:1144). Dalam buku peraturan tata tertib DPRD Kota Surabaya, ada enam jenis rapat dalam kegiatan DPR. Menurut setiap alat kelengkapan DPRD mempunyai jenis rapat tersendiri (misalnya Rapat Komis, Rapat Fraksi) yang diikuti oleh anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan dipimpin oleh masing-masing pimpinan alat kelengkapan tersebut. Masing-masing mempunyai tujuan, ruang lingkup, dan jangkauannya sendiri. Rapat-rapat tersebut adalah rapat paripurna (rapur), rapat paripurna luar biasa, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta rapat masing-masing dari alat kelengkapan DPRD. Jenis-jenis rapat tersebut pengaturannya juga terdapat dalam tata tertib DPRD.

Dalam sebuah rapat DPRD menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu alat komunikasi utama dalam merumuskan undang-undang ataupun untuk menyelesaikan permasalahan di pemerintahan. Fungsi bahasa Indonesia tersebut memegang peran dominan pada setiap rapat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya rapat, sehingga apabila menggunakan bahasa yang sama dan dimengerti oleh semua anggota maka rapat akan berjalan dengan lancar.

Contoh pada salah satu dialog di bawah ini terjadi penyimpangan prinsip sopan santun pada maksim pujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari perbandingan dialog (1) dan (2) sebagai berikut :

(1) *Ketua Rapat* : *“Cara Anda menyampaikan pendapat dalam rapat ini sangat bagus.”*

*Anggota* : *“Ah, tidak Pak. Pendapat saya hanya biasa saja.”*

(2) *Ketua Rapat* : *“Cara Anda menyampaikan pendapat dalam rapat ini sangat bagus.”*

*Anggota* : *“Ah, jelas dong Pak. Hal sepele untuk berpendapat saja mana mungkin saya tidak bisa Pak.”*

Dari dua dialog di atas dapat dijelaskan bahwa tokoh ketua rapat dalam dialog (1) dan (2) bersikap sopan karena berusaha memaksimalkan keuntungan anggotanya. Anggotanya dalam dialog (1) menerapkan paradoks pragmatik dengan berusaha meminimalkan penghargaan diri sendiri, sedangkan anggotanya dalam dialog (2) telah melanggar paradoks pragmatik dengan berusaha memaksimalkan keuntungan diri sendiri. Sehingga dari tuturan dialog (2) sudah berlaku tidak sopan. Contoh tuturan di atas dapat di kaji lebih dalam dengan analisis pragmatik yang berisi tentang prinsip sopan santun.

Penelitian yang peneliti ambil mengarah pada objek DPRD Kota Surabaya dengan kajian pragmatik yang membahas tentang penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Bagi peneliti, penelitian ini sangat menarik pertama dalam objek ini menggunakan Kota Surabaya. Dialek bahasa yang di gunakan dalam kota ini menggunakan dialek Suroboyoan dengan intonasi yang relatif tinggi. Kedua dimana di dalam sebuah rapat DPRD yang orang-orangnya termasuk masyarakat golongan politik dari berbagai daerah asal dan kebanyakan dari daerah Kota Surabaya yang berkumpul menjadi satu dalam suatu lembaga dewan legislatif atau bisa disebut juga dengan perwakilan rakyat yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik sekiranya dalam menggunakan bahasa Indonesia.

### Hasil dan Pembahasan

Bentuk penyimpangan yang terjadi meliputi penyimpangan dari prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Di dalam penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun terbagi lagi dari berbagai maksim. Maksim yang terdapat pada prinsip kerjasama meliputi: maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Sedangkan maksim yang terdapat dapat dalam prinsip sopan santun meliputi: maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

Dibawah ini merupakan analisis pengelompokan dari penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun yang terjadi pada rapat dinas terbuka DPRD Kota Surabaya.

### Bentuk Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dalam Proses Rapat di DPRD Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil temuan dari data yang telah diteliti menghasilkan bentuk pengelompokan penyimpangan pada Prinsip Kerja Sama dalam proses rapat dinas terbuka yang meliputi berbagai maksim, yaitu: maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil data yang tergolong penyimpangan prinsip kerja sama melalui pengelompokan dari berbagai maksim

### Maksim Kuantitas

#### KORPUS DATA

Pukul : 11.25 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda : Sebelum Rapat berlangsung

#### KONTEKS

Dalam percakapan tersebut penutur bertanya kepada lawan tutur (b) mengenai penilaian soal UNAS. Penutur (a) mengharapkan jawaban yang tepat, seinformatif yang dibutuhkan dan informasi yang diberikan tidak melebihi yang dibutuhkan.

#### DATA

(a) : Hari ini jadwal rapat dari jam berapa sampai jam berapa Mbak?  
(b) : Oh, itu pak hari ini rapat mulai jam 11.25 sampai selesai pak. Dinas Pendidikan hari ini yang datang hanya sedikit Pak, jadi banyak yang izin tidak menghadiri rapat Pak.

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : menjelaskan sesuatu.
2. Tuturan ini termasuk ke dalam Penyimpangan Perinsip Kerja Sama dengan Maksim Kuantitas, karena lawan tutur (b) menjawab pertanyaan penutur (a) dengan memberikan informasi melebihi yang dibutuhkan.
3. Pola penyimpangan : lawan tutur (a) ke penutur (b).

Dari tuturan analisis korpus data pada lawan tutur (b) dapat dikatakan memberikan informasi melebihi yang dibutuhkan. Lawan tutur (b) menanggapi pertanyaan penutur (a) dengan memberikan kontribusi yang melebihi kebutuhan penutur (a). Penutur (a) menanyakan siapa yang memberi nilai soal UNAS. Lawan tutur (b) menanggapi pertanyaan ini dengan memberikan kontribusi yang berlebihan, sehingga terlihat dari turuan lawan tutur (b) berikut ini

*“Oh, itu pak hari ini rapat mulai jam 11.25 sampai selesai pak. Dinas Pendidikan hari ini yang datang hanya sedikit Pak, jadi banyak yang izin tidak menghadiri rapat Pak.”*

Dari kalimat diatas terlihat bahwa lawan tutur (b) kurang kooperatif karena memberikan kontribusi yang berlebihan, yang sebenarnya tidak dibutuhkan penutur (a). Hal ini dapat menimbulkan kurang tercapainya tujuan suatu komunikasi. Dalam sebuah tuturan ini lawan tutur (b) dikatakan menyimpang dari maksim kuantitas, karena peserta tutur (b) memberikan informasi secara berlebihan. Sehingga tuturan tersebut masuk kedalam golongan penyimpangan maksim kuantitas.

### Maksim Kualitas

#### KORPUS DATA

Data : 1  
Pukul : 11.25 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : Persiapan UNAS

---

#### KONTEKS

Pada penutur (81);(83); dan (85) merupakan ketua komisi sedangkan (82);(84); dan (86) merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Ketika penutur (85) bertanya kepada lawan tutur (86), tanggapan yang di berikan lawan tutur (86) tidak nyata karena mengikuti pendapat penutur (86)

---

#### DATA

(81) : Ya, jadi soalnya belum tau sama atau tidak kan gitu ya?  
(82) : Asopsinya sama pak 20, tiap siswa beda asopsinya sama.  
(83) : Ya kalau sama kabupaten bisa oh *soale ngene-ngene*, tapi ya sulit.  
(84) : Tidak sama kalau paket dengan yang reguler itu ndak sama.  
(85) : Pasti agak lebih mudah mungkin?  
(86) : Mungkin

---

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : menanggapi dengan tujuan mengikuti pendapat penutur (85).
2. Tuturan ini termasuk dalam Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dengan Maksim Kualitas, karena lawan tutur (86) menanggapi tuturan dari penutur (85) tidak nyata hanya saja menanggapi dengan cara mengikuti pendapat penutur.
3. Pola penyimpangannya : lawan tutur (86) ke penutur (85).

Dari korpus data di atas menunjukkan tuturan yang menyimpang dari maksim kualitas. Lawan tutur (86) menanggapi pertanyaan yang di lontarkan oleh penutur (85) dengan jawaban yang tidak nyata, tidak sesuai dengan bukti yang memadai. Tujuan jawaban lawan tutur itu hanya sebatas menanggapi dengan cara mengikuti pendapat penutur (85) dari pertanyaan yang di lontarkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari ucapan lawan tutur (86) yaitu: “*mungkin.*” Dalam tuturan tersebut belum dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, hanya saja karena lawan tutur memeberikan tanggapan yang mengikuti pendapat penutur (85) sebelumnya. Sehingga dapat di katakan apa yang di lontarkan lawan tutur termasuk golongan penyimpangan maksim kualitas. Selain contoh di atas, penyimpangan maksim kualitas terdapat pula pada data di bawah ini.

### Maksim Relevansi

#### KORPUS DATA

Data : 4  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : Rapat Panitia Khusus membahas Raperda Kota Surabaya tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

### KONTEKS

Pembicaraan pada rapat ini sedikit ricuh ketika penutur (302);(304);(306); dan (308) adalah Anggota DPRD dari F-PKB. Sedangkan penutur (303) dan (309) adalah Anggota DPRD dari F-PDIP sehingga dalam komunikasi yang terjadi keluar dari topik pembicaraan. Dikarenakan penutur yang dari Anggota DPRD F-PKB melakukan penyimpangan dengan cara menyindir permasalahan rapat di hubung-hubungkan dengan F-PDIP.

### DATA

(302) : Terakhir Bu. Dari pak Rizal yang dikatakan bu Ine tadi pembahasan ini tahun 2008, 2009 PERDA yang 7 itu kan? Ya kan? Padahal sebenarnya 10% sudah muncul tahun 2002 pak. Yah? Kenapa kok tidak pakek dulu *opo lali opo yo'opo? Heh, opo kok senengan'ne lalian ta?* Jadi kecuali kalau 10% itu adanya tahun 2010 atau 2011 mungkin pantaslah pantes. Artinya bahwa kelahiran PERDA ini lebih dahulu undang-undangnya yang menyambut tentang 10% *opo* di pikir-pikir 5 juta iku titik rek? coba 10% bangunanya kan *luwih* banyak kan. Karena milyaran kan? Itu kan. Itu lah *opo'o* kemarin itu kan saya mohon maaf akhirnya kan saya curiga secara politis kan. Saya orang politik pantes-pantes saja saya curiga. Berarti ada sesuatu bahwa saya ndak tahu tahun 2009 ini apakah masih periode lama atau periode baru? Saya pikir periode lama. Jadi periode saya jadi anggota DPR pertama. Ini ada sesuatu sebenarnya. Ini secara politik ada sesuatu karena apa kecuali sekali lagi undang-undangnya tahun 2010 *no problem* buat saya. Undang-undangnya itu ada tahun 2002. RAPERDA ini disusun tahun 2008, 2009 di dok. Kenapa tidak memakai 10% ? apa kemungkinan *sek kaet iling?* Bawasannya 10% *iku luwih akeh* atau para politis. *Sepurane* Pak Bambang mau nyalon lagi? waktu dulu?

(303) : Loh ?

(304) : Serius ini saya katakan. Betul itu saya katakan. Karena itu kepentingan politik saya katakan. Lah inilah maka saya katakan *yo mbk yo ojok yon gene tapi ngene, yo ngono tapi ojok ngono* ini maksud saya Pak. Lah akhirnya kemarin saya di tawarkan, pak denda 10% itu bukan sekarang loh Pak. Wis jaman dulu. Untung di ingatkan bu Ine. Coba mikir kita ya itu tadi pak. Saya yakin jawaban pak Rizal apa “Saya belum di bagian hukum paling Pak”

(305) : Hahaha . . .

(306) : Mumpung belum di jawab saya jawab dulu. Karena waktu itu kepala hukumnya kan Pak Anang. Pak Anang perpindahan dari Pak Hadi ke Pak Anang. Saya hafal waktu itu. Gak-gak insya Allah 2009 sudah pak Anang. Ya bu ya? (*bertanya kepada bagian hukum*).

(307) : Ya Sudah.

(308) : Gak, Pak Hadi sudah asisten kok waktu itu. Sekali lagi saya curiga secara politis dalam hal ini pokoknya semua usaha bisa *belani* PDI kok.

(309) : Hahaha . .

### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dengan tujuan menyindir sehingga menimbulkan kelucuan.
2. Tuturan ini termasuk kedalam Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dalam maksim Relevansi, karena peserta tutur memberikan argumen yang tidak relevan.
3. Pola penyimpangan : Penutur dari Anggota DPRD F-PKB kepada Lawan tutur dari Anggota DPRD F-PDIP

Dari tuturan hasil korpus data diatas terjadi penyimpangan maksim relevansi. Ketika penutur yang dari Anggota DPRD F-PKB menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan pembahasan PERDA yang awalnya masih relevan lama-kelamaan penutur menyampaikan bahwasannya persoalan pembahasan PERDA itu ada hubungannya dengan permainan politik seperti yang di utarakannya sebagai berikut.

*“Terakhir bu. Dari Pak Rizal yang dikatakan Bu Ine tadi pembahasan ini tahun 2008, 2009 PERDA yang 7 itu kan? Ya kan? Padahal sebenarnya 10% sudah muncul tahun 2002 pak. Yah? Kenapa kok tidak pakek dulu opo lali opo yo'opo? Heh, opo kok senengan'ne lalian ta? Jadi kecuali kalau 10% itu adanya tahun 2010 atau 2011 mungkin pantaslah pantes. Artinya bahwa kelahiran PERDA ini lebih*

*dahulu undang-undangnya yang menyambut tentang 10% opo di pikir-pikir 5 juta iku titik rek? coba 10% bangunanya kan luwih banyak kan. Karena milyaran kan? Itu kan. Itu lah opo'o kemarin itu kan saya mohon maaf akhirnya kan saya curiga secara politis kan. Saya orang politik pantes-pantes saja saya curiga. Berarti ada sesuatu bahwa saya ndak tahu tahun 2009 ini apakah masih periode lama atau periode baru? Saya pikir periode lama. Jadi periode saya jadi anggota DPR pertama. Ini ada sesuatu sebenarnya. Ini secara politik ada sesuatu karena apa kecuali sekali lagi undang-undangnya tahun 2010 no problem buat saya. Undang-undangnya itu ada tahun 2002. RAPERDA ini disusun tahun 2008, 2009 di dok. Kenapa tidak memakai 10% ? apa kemungkinan sek kaet iling? Bawasannya 10% iku luwih akeh atau para politis. Sepurane Pak Bambang mau nyalon lagi? waktu dulu?"*

Dari kalimat di atas pada dua kalimat baris terakhir itu penutur menyebutkan:

*"Kenapa tidak memakai 10% ? apa kemungkinan sek kaet iling? Bawasannya 10% iku luwih akeh atau para politis. Sepurane, apa Pak Bambang mau nyalon lagi? waktu dulu?"*

Dari kalimat tersebut diterangkan bahwasannya Pak Bambang merupakan orang politik yang dari kubu F-PDIP. Di sini penyimpangan yang terjadi yaitu penutur memeberikan pendapat yang ujung-ujungnya menyindir salah satu di antara anggota rapat yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD dari F-PDIP. Dari hal tersebut tuturan yang di sampaikan penutur dengan tujuan memberikan pendapat yang ujung-ujungnya menyindir sesama Anggota DPRD membuat rapat menjadi semakin ricuh dan tidak berjalan dengan lancar sehingga tuturan tersebut tergolong penyimpangan maksim relevansi. Selain contoh di atas, penyimpangan maksim kualitas terdapat pula pada data di bawah ini.

## **Maksim Pelaksanaan**

### KORPUS DATA

Data : 1  
Pukul : 11.25 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : Persiapan UNAS

---

### KONTEKS

Dalam komunikasi rapat ini penutur (42);(44) merupakan Ketua rapat sedangkan lawan tutur (43) merupakan dinas pendapatan. Dari komunikasi tersebut penutur menanyakan tentang variabel soal sedangkan lawan tutur memberikan jawaban yang tidak jelas dan memiliki dwimakna.

---

### DATA

(42) : Variabel soalnya berapa? 20 juga?  
(43) : Satu pak. Paketnya cuma satu?  
(44) : Kalau SD satu? Jadi masih memungkinkan buka peluang untuk contoh-contohan, buka peluang untuk bocoran soal kan seperti itu ya? Ya kan?  
(45) : Di suratnya begitu pak, jadi paketannya hanya satu.

---

### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : menjawab pertanyaan penutur (42) dengan jawaban yang bermakna ganda.
2. Analisis yang terjadi pada data di atas telah melanggar Perinsip Sopan Santun dalam Maksim Pelaksanaan karena lawan tutur (43) tidak jelas memberikan jawaban dari pertanyaan yang di lontarkan penutur (42) dan bermakna ganda.
3. Pola penyimpangannya : Lawan tutur (43) kepada (42)

Dari hasil analisis korpus data diatas dijelaskan bahwa penyimpangan maksim pelaksanaan terjadi ketika lawan tutur (43) memberikan pertanyaan kepada penutur (42). Tutaran yang di berikan penutur (42) kepada lawan tutur (43) dijawab tidak jelas dan menghasilkan dwimakna karena pertanyaan yang di lontarkan tersebut tentang variabel soal, sedangkan jawaban yang di lontarkan lawan tutur yaitu paketan soal sehingga dari jawaban tersebut menghasilkan makna ambiguitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data tesebut tergolong penyimpangan maksim pelaksanaan.

### **Bentuk Penyimpangan Prinsip Sopan Santun dalam Proses Rapat di DPRD Kota Surabaya**

Melalui hasil temuan dari data yang telah diteliti menghasilkan bentuk pengelompokan penyimpangan pada Prinsip Sopan Santun dalam proses rapat dinas terbuka. Penyimpangan tersebut meliputi berbagai maksim, yaitu: maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Berikut ini peneliti akan memaparkan hasil data yang tergolong penyimpangan prinsip sopan santun melalui pengelompokan dari berbagai maksim.

#### **Maksim Kearifan**

##### KORPUS DATA

Data : 3  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : Rapat Panitia Khusus membahas Raperda Kota Surabaya tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

##### KONTEKS

Dalam rapat tersebut diterangkan bahwa penutur (306) merupakan Anggota DPRD sedangkan (307) merupakan perwakilan Bagian Hukum. Penutur mencoba memberikan masukan kepada perwakilan perusahaan akan tetapi ujung-ujungnya di balik masukan terebut tertuju menyindir kepada lawan tutur yang juga anggota DPRD dari F-PDIP.

##### DATA

(306) : Mumpung belum di jawab saya jawab dulu. Karena waktu itu kepala hukumnya kan Pak Anang. Pak Anang perpindahan dari Pak Hadi ke Pak Anang. Saya hafal waktu itu. Gak-gak insya Allah 2009 sudah Pak Anang. Ya bu ya?  
(307) : Ya Sudah.  
(308) : Gak, Pak Hadi sudah asisten kok waktu itu. Sekali lagi saya curiga secara politis dalam hal ini pokoknya semua usaha bisa *belani* PDIP kok.

##### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dan memberikan masukan.
2. Dalam analisis ini penutur (306) telah melanggar Penyimpangan Sopan Santun dalam Maksim Kearifan. Penutur memberikan masukan kepada perwakilan perusahaan dalam menyelesaikan masalah ini, akan tetapi apa yang di sampaikan penutur bukan malah memberi masukan akan tetapi menyindir lawan tutur yang juga Anggota DPRD dari F-PDIP.
3. Pola penyimpangan : Penutur (306) ke Lawan tutur yang juga Anggota DPRD.

Korpus data menghasilkan analisis yang menjelaskan bahwa penutur (306) telah melanggar Penyimpangan Prinsip Sopan Santun dalam maksim Kearifan. Dalam percakapan tersebut penutur (306) memberikan masukan kepada perwakilan perusahaan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Akan tetapi diujung-ujung masukan tersebut apa yang di sampaikan penutur (306) beralih menjadi sindiran kepada anggota DPRD dari golongan F-PDIP, yang berbunyi:

*“Gak, Pak Hadi sudah asisten kok waktu itu. Sekali lagi saya curiga secara politis dalam hal ini pokoknya semua usaha bisa belani PDIP kok”*

Dari tuturan diatas terlihat jelas bahwa yang di tuturkan penutur (306) menyindir lawan tuturnya yang juga anggota dewan. Sehingga penutur telah melanggar penyimpangan prinsip sopan santun.

#### KORPUS DATA

Data : 1  
Pukul : 11.25 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : Persiapan UNAS

---

#### KONTEKS

Ketika rapat sedang berlangsung, penutur (17) sebagai ketua rapat memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan aspirasi tentang apa yang ingin diutarakan. Dari tuturn yang di berikan penutur (17) kurang sopan karena tuturan tersebut telah membuat kerugian kepada lawan tutur (18).

---

#### DATA

(17) : Silahkan!

(18) : Terima kasih ketua. Sebagai pelaksana ya jadikan tadi disampaikan sebagai pelaksana ya bu? Pelaksana Ujian Nasional pada tahun ini apakah juga sudah diprediksi terkait siswa-siswa yang berada di rumah sakit misalnya, atau kemudian tersangkut masalah hukum yang misalnya harus melaksanakan ujian-ujian di tempatnya itu. Itu kan juga butuh petugas yang khusus dan waktu yang tidak sama mungkin kan begitu. Kemudian terkait, saya tadi sekilas membaca yang memang juga berita-berita sebelumnya yang terkait siswa yang hamil tahun ini pak itu berapa jumlahnya dan apakah memang itu di satu tempat yang sama atau memang dikhususkan? Maksud saya kan biasanya kan karena ada beban psikologis sehingga dia ingin mengerjakan sendiri misalnya tidak bergantung dengan teman-temannya.

---

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dengan tujuan kurang sopan.
2. Analisis data di atas menjelaskan bahwa tuturan yang di berikan oleh penutur (17) sangat dirasa kurang sopan, karena tuturan hanya berkata singkat dan terlihat memaksa, sehingga tuturan tersebut termasuk penyimpangan Prinsip Sopan Santun dalam Makim Kearifan.
3. Pola penuturannya : Penutur (17) kepada lawan tutur (18)

Hasil tuturan yang di jelaskan diatas sudah sangat jelas bahwa tuturan yang di lontarkan penutur (17) sangat tidak sopan karena tuturan tersebut mempunyai arti menyuruh tanpa dengan cara halus dan sopan hanya dengan bertutur *“Silahkan!”* dari situ sudah sangat jelas telah melanggar maksim kearifan yaitu memnuat kerugian orang lain sebesar mungkin.

## Maksim Kedermawanan

### KORPUS DATA

Data : 4  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : PHK yang dilakukan oleh PT. Sinar Angkasa Rungkut.

---

#### KONTEKS

Ketika rapat akan berlangsung, penutur (a), (b) dan (c) sedang berbincang-bincang di ruangan komisi D.

---

#### DATA

- (a) : Pak, saya nanti malam ke rumah bapak mau silaturahmi.  
(b) : Oh, ya. Silahkan.  
(c) : Pak, kalau saya nanti malam boleh apa tidak ikut ke rumah bapak juga sama ingin bersilaturahmi.  
(b) : Loh ya silahkan ibu. Saya senang menjamu Bapak Ibu.
- 

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Penutur (a) berusaha menguntungkan dirinya untuk merugikan lawan tutur (b).
2. Dari data analisis pada tuturan (a) dirasa jauh tidak sopan dibandingkan dengan tuturan (c) karena tuturan (a) yang berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya dan menyusahkan orang lain. Sehingga pada tuturan (a) telah menyimpang dari maksim kedermawanan.
3. Pola penerapannya : Penutur (c) kepada penutur (b).

Analisis data dari korpus data diatas pada tuturan (a) yang dilontarkan kepada lawan tutur (b) telah merugikan penutur (b) yang terjadi pada dialog di bawah ini:

“(A): Pak, saya nanti malam ke rumah bapak mau silaturahmi.”

Dari kalimat tersebut menjelaskan bahwa keinginan penutur (a) kepana lawan tutur (b) yang ingin bersilaturahmi kepada lawan tutur (b) tanpa tawaran dari lawan tutur (b) terlebih dahulu membuat kerugian pada lawan tutur (b) sehingga penutur (a) telah melanggar maksim kedermawanan, berbeda dengan penutur (c) yang sebelumnya meminta izin terlebih dahulu untuk bersilaturahmi di rumah beliau. Sehingga dapat di kategorikan bahwa penutur (c) jauh lebih sopan dari pada penutur (a).

## Maksim Pujian

### KORPUS DATA

Data : 1  
Pukul : 11.25 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : Persiapan UNAS

---

#### KONTEKS

Ketika rapat untuk membahas UNAS berlangsung, di tengah-tengah komunikasi penutur (88) mengecam orang lain (Peserta tua-tua yang ikut ujian kejar paket) karena belum tentu bisa mengerjakan soal UNAS

---

#### DATA

- (88) : Tapi pesertanya tua-tua.  
(89) : Lah iya.  
(90) : *Wis ndak mempan* kalau disuruh matematika ya udah gak bisa . . .
- 

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dan mengecam peserta kejar paket UNAS
2. Dalam analisis ini penutur (88);(89) mengecam peserta kejar paket sehingga dari tuturan penutur telah melanggar maksim pujian.
3. Pola penerapannya : Penutur (88); (89) kepada peserta kejar paket UNAS

Analisis yang timbul dari data ini menjelaskan bahwa penutur (88);(90) telah melanggar maksim pujian karena penutur mengecam orang lain sebanyak mungkin seperti apa yang telah di utarakannya, yaitu :

“*Wis ndak mempan kalau disuruh matematika ya udah gak bisa ..*”

Dari tuturan diatas menjelaskan bahwa penutur mengecam peserta yang mengikuti kejar paket A,B, atau C. Padahal orang yang mereka kecam belum tentu tak bisa menjawab soal-soal kejar paket meskipun usianya sudah lanjut. Sehingga dapat di kategorikan bahwa apa yang telah di katakan termasuk penerapan penyimpangan maksim pujian.

#### KORPUS DATA

Data : 4  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : PHK yang dilakukan oleh PT. Sinar Angkasa Rungkut.

---

#### KONTEKS

Dalam rapat sempat terjadi perdebatan antara penutur dengan lawan tutur yang merupakan sebagai perwakilan perusahaan. Penutur mengecam lawan tutur tersebut.

---

#### DATA

(467) : Lah wis percuma *sampean gak iso, soal'e sampean ndak iso* memutuskan. Sampean itu cuma diberi kuasa untuk itu.

(468) : Ya benar-benar.

---

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dengan mengecam lawan tutur.
2. Data yang telah di analisis di atas melanggar penyimpangan maksim pujian karena apa yang diutarakan oleh penutur (467) kepada lawan tutur telah mengecam bahwa lawan tutur tidak dapat memberikan solusi tentang permasalahan ini.
3. Pola penerapannya : Lawan tutur (130) kepada penutur (129).

Analisis data yang dapat di simpulkan dari komunikasi diatas yaitu sang penutur (467) telah melanggar prinsip sopan santun dalam maksim pujian. Lawan tutur yang merupakan perwakilan dari pabrik telah di kecam oleh penutur (467) dengan tuturan yang di lontarkan sebagai berikut:

“*Lah wis percuma sampean gak iso, soal'e sampean ndak iso* memutuskan. Sampean itu cuma diberi kuasa untuk itu.”

Dari ungkapan tersebut penutur menyampaikan tuturannya yang mempunyai arti bahwa penutur (467) mengaggap kalau lawan tutur yang merupakan perwakilan perusahaan tersebut tidak dapat membuat keputusan mengenai persoalan yang dihadapi.

## Maksim Kerendahan Hati

### KORPUS DATA

Data : 4  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : PHK yang dilakukan oleh PT. Sinar Angkasa Rungkut.

---

#### KONTEKS

Dalam rapat yang berlangsung, penutur (535) sebagai anggota DPRD memberikan masukan kepada perwakilan perusahaan agar bisa segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ia memuji dirinya sendiri bahwa DPRD bisa menyelesaikan masalah pabrik yang lain dengan jumlah pegawai yang banyak.

---

#### DATA

(535) : Rimo tak gowo nang Jakarta akhirnya ada titik temu. Niatan baik DPRD sama pihak perusahaan klop selesai. Disini ada ucapan selamat terima kasih. Kita gak tidak meminta imbalan yang penting ada musyawarah, niatan baik dari perusahaan untuk menyelesaikan itu aja. Ini kan sudah terkatung-katung sudah ada kesepakatan tapi gak tau kesepakatannya. Ini kan *miss communication* ya Pak Yusak ini saran sampaikan pada pihak perusahaan nanti kalau tidak ada titik temu ya nanti saya akan tetap koordinasi dengan karyawan sedikit rapat internal bagaimana proses ini tapi tetap saya akan pantau. Saya kira itu. Pak Pulung ada yang lain? Gus fatwa gus?

(536) : Cukup Pak.

---

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dan memberi masukan.
2. Analisis yang terlihat dari data di atas menjelaskan bahwa penutur (535) telah melakukan penyimpangan maksim kerendahan hati, karena panutur (535) telah menyombongkan dirinya sendiri.
3. Pola tuturan : Tuturan (535) kepada perwakilan perusahaan.

Analisis dari kerpus data di atas menjelaskan bahwa penutur telah melakukan penyimpang prinsip sopan santun dalam maksim kerendahan hati karena penutur dalam menyampaikan tuturan menyombongkan dirinya sendiri sebagai Anggota Dewan. Sehingga meskipun ia berniat baik atas apa yang ia utarakan tetap saja apa yang ia utarakan tetap melanggar maksin kerendahan hati.

## Maksim Kesepakatan

### KORPUS DATA

Data : 2  
Pukul : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi A (Bidang Pemerintahan)  
Agenda Rapat : Pendanaan Pelaksanaan Program E-KTP dalam APBD Tahun 2013

---

#### KONTEKS

Penutur (129) dan lawan tutur (130) masih berdiskusi dalam rapat dengan tema program E-KTP. Penutur (129) berharap lawan tutur memberikan kontribusi jawaban yang sepatat dengan apa yang ia tanyakan. Akan tetapi lawan tutur tidak sepaham dengan apa yang di tanyakan penutur.

---

#### DATA

(129) : Berarti ini semua banyak yang gak jelas pak. Kalau semua sudah di buat foto kopi. Yah, berarti ndak bisa digunakan?

(130) : Belum tentu, soalnya ada yang sering foto kopi ada yang masih bisa terbaca.

---

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara dengan tujuan tidak sepaham karena aturan yang ada.
2. Data yang telah di analisis di atas melanggar penyimpangan maksim kesepakatan karena apa yang di jawab oleh lawan tutur tidak sepaham apa yang penutur ungkapkan.
3. Pola penerapannya : Lawan tutur (130) kepada penutur (129).

Korpus data menerangkan bahwa apa yang Sehingga apa yang telah di paparkan pada analisis di atas merupakan penyimpangan maksim kesepakatan. Karena lawan tutur melontarkan jawaban yang tidak sepaham dari apa yang di tanyakan oleh lawan tutur.

### Maksim Simpati

#### KORPUS DATA

Data : 4  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)  
Agenda Rapat : PHK yang dilakukan oleh PT. Sinar Angkasa Rungkut.

---

#### KONTEKS

Penutur (499) mengungkapkan bawa ia tidak begitu mempunyai rasa empati kepada lawan tutur yang merupakan perwakilan dari perusahaan. Lawan tutur (500) yang merupakan karyawan pabrik merasa setuju dari apa yang telah di ungkapan oleh penutur

---

#### DATA

(499) : Demo kesana, nyeluk media sing akeh. Chiyoda iso gak payu pak, lah ambek karyawanne ae koyok ngunu. Lah lampune biarpet-biarpet gak karuh-karuahan.

(500) : Hahaha. . . betul

---

#### ANALISIS

1. Tujuan tuturan : Berbicara tanpa memiliki rasa simpati.
2. Analisis yang terlihat dari data di atas menjelaskan bahwa penutur (499) telah melakukan penyimpangan maksim simpati, karena penutur (500) telah memperkecil rasa empatinya kepada lawan tutur yang merupakan perwakilan dari perusahaan.
3. Pola tuturan : Tuturan (499) kepada perwakilan perusahaan.

Dapat di simpulkan dari korpus data di atas bahwa penutur (499) telah melanggar maksim pujian yang seharusnya tidak di ungkapkan penutur (499). Dalam hal ini penutur mengungkapkan kekecewaannya kepada lawan tutur yang merupakan perwakilan dari perusahaan sehingga ia mengurangi rasa simpatinya kepada lawan tutur, sedangkan lawan tutur yang merupakan karyawan pabrik mendukung atas apa yang telah di tuturkan oleh lawan tutur.

### Simpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya penyimpangan yang timbul pada rapat terbuka di DPRD Kota Surabaya. Penyimpangan tersebut terdiri dari penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Penyimpangan yang terjadi dalam proses rapat dinas mencakup berbagai maksim yang di timbulkan dari prinsip kerja sama yaitu, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan. Sedangkan penyimpangan dari prinsip sopan santun yang timbul terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim dan maksim simpati.

## Referensi

- Arikunto, Suharimi. 2002. *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisanty, Rizky. 2007. "Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun dalam Talk Show Empat Mata di Trans 7". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya (belum diterbitkan).
- DPRD Kota Surabaya, Sekretaris, "Jenis Rapat". <http://www.dprd.surabaya.go.id>, diakses 22 April 2012.
- . Sekretaris, "Profil Dewan". <http://www.dprd.surabaya.go.id>, diakses 26 Juni 2013.
- Gunawan, Markus. 2008. *"Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif, DPR, DPRD, dan DPD"*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Kridalaksana, Harimurti. 2011. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Feby Aditya. 2010. "Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun dalam Reality Show Superstar Show di Indosiar". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya (belum diterbitkan).
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. terjemahan Dr. M.D.D Oka, M.A). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahsun, Dr. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan teknikny*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Meiliya, Intan. 2005. "Percakapan dalam Proses Persidangan di Pengadilan Militer Surabaya Kajian Prgmatik". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya (belum diterbitkan).
- Nadar, FX. 2009. *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugraheni, Dian. 2011. "Penyimpangan Prinsip Sopan Santun dalam Tayangan Humor Opera Van Java di Trans 7". Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya (belum diterbitkan).
- Rahardi, Kunjana. 2003. *Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Malang: Dioma.
- . 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rambe, Samsir dkk. 1994. *Etika Komunikasi 1*. Bandung: Angkasa.

Solihin, M Nur, "Sidang dan Rapat di DPR" <http://www.parlemen.net>, diakses 22 April 2012.

Sudaryanto. 1992. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.

Tim Penyusun Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, "Tentang Pemerintahan Daerah",  
[www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), diakses 22 April 2012.

Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Adi Offset.

Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.